

KRISIS MIGRAN DI LAMPEDUSA: ANALISIS KEBIJAKAN UNI EROPA DAN DAMPAK SOSIAL-EKONOMI

Rana Aghisna Putri

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Email: ranaghisna12@gmail.com

ABSTRAK

Studi ini menganalisis krisis migrasi di Lampedusa melalui perspektif keamanan multidimensi dengan menggunakan kerangka sekuritisasi Barry Buzan. Arus masuk migran melalui Mediterania Tengah, terutama dari Afrika Utara, menunjukkan kerumitan migrasi ilegal yang dipengaruhi faktor sejarah, politik, dan sosial-ekonomi. Respons Italia—mulai dari penguatan kontrol perbatasan, kerja sama dengan Libya, hingga keterlibatan dalam kebijakan Uni Eropa, menunjukkan bagaimana migrasi dikonstruksikan sebagai ancaman eksistensial yang mencakup dimensi militer, ekonomi, sosial, lingkungan, dan politik. Krisis kemanusiaan di Lampedusa, diperburuk oleh fasilitas yang padat dan minimnya layanan dasar, turut memicu ketegangan politik di Italia dan di tingkat Uni Eropa. Inisiatif Uni Eropa, termasuk rencana aksi 10 poin pada 2023, menekankan perlunya pembagian tanggung jawab dan peningkatan kerja sama dengan negara asal dan transit migran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan krisis memerlukan pendekatan holistik yang menargetkan akar penyebab migrasi serta menyeimbangkan prioritas keamanan nasional dengan kewajiban internasional. Hal ini menunjukkan dinamika antara kepentingan nasional dan integrasi Eropa dalam membentuk tata kelola migrasi.

Kata Kunci: Imigran; Lampedusa; Sekuritisasi; Uni Eropa

ABSTRACT

This study examines the migration crisis in Lampedusa through a multidimensional security perspective, drawing on Barry Buzan's securitization framework. The persistent influx of migrants arriving via the Central Mediterranean, largely from North Africa, reflects the complexity of irregular migration driven by historical, political, and socio-economic factors. Italy's response, ranging from strengthened border controls to cooperation with Libya and participation in EU-led measures—illustrates how migration has been constructed as an existential security concern encompassing military, economic, societal, environmental, and

political dimensions. The humanitarian emergency in Lampedusa, exacerbated by overcrowded facilities and inadequate basic services, also fuels political tensions within Italy and across the European Union. EU initiatives, including the 10-point action plan announced in 2023, underscore the need for shared responsibility and deeper cooperation with countries of origin and transit. The study concludes that addressing the crisis requires a holistic approach that targets root causes while balancing national security priorities with international obligations, highlighting the interplay between national interests and European integration in shaping migration governance.

Keywords: Immigrant; Lampedusa; Securitization; European Union.

Pendahuluan

Krisis imigran yang terjadi sejak pertengahan abad ke-20 membuat Italia menjadi salah satu tujuan utama bagi para imigran di Eropa. Berdasarkan data dari United Nations Human Rights Council (UNHCR), sejak Januari 2014 hingga Maret 2019, telah banyak imigran yang datang melalui Laut Mediterania di mana mayoritas berasal dari wilayah Afrika bagian Utara. Hal ini menunjukkan betapa rumitnya masalah migrasi ilegal di Eropa. Pada masa lalu, orang sering berpindah tempat karena perang, kelaparan, atau penganiayaan etnis dan agama. Namun, dengan munculnya negara-negara modern dan hukum yang berbasis wilayah, sikap terhadap migrasi berubah. Sistem negara Westphalia tahun 1648 menjadi dasar munculnya istilah 'migrasi ilegal'. Negara-negara kemudian mulai membuat hukum yang menganggap migrasi ilegal sebagai tindakan kriminal. Misalnya, pada tahun 2009, Italia mengubah status migrasi ilegal dari pelanggaran administratif menjadi pelanggaran kriminal dengan denda hingga €10.000.

Menurut materi dari *The International Journal of Human Rights*, alasan di balik migrasi ilegal sangat kompleks. Selain kondisi di negara asal yang buruk, seperti pemerintahan yang gagal, rezim otoriter, dan wilayah yang dilanda perang, terdapat faktor dari Eropa itu sendiri. Ketimpangan ekonomi dan politik, serta kebijakan perdagangan yang tidak seimbang, seperti perjanjian perikanan multilateral, turut memperparah masalah ini. Selain itu, mitos tentang 'mimpi Eropa' yang membuat banyak orang percaya bahwa hidup di Eropa akan jauh lebih baik, juga menambah masalah ini.

Oleh karena itu, Ketua Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen, meluncurkan rencana aksi sepuluh poin untuk membantu Italia menghadapi krisis migran di Lampedusa. Von der Leyen menegaskan bahwa migrasi adalah masalah yang harus diselesaikan oleh seluruh Eropa, dan Italia bisa mengandalkan dukungan dari Uni Eropa.

Menurut Thomas Bernauer, sebagaimana dikutip oleh Kate O'Neill, kerjasama internasional adalah proses di mana pihak-pihak yang terlibat berusaha mengubah perilaku atau kondisi dari aktor-aktor lain menuju arah yang diinginkan. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang telah ditetapkan dengan cara yang efisien dan adil. Salah satu poin penting dari rencana ini adalah bahwa Eropa harus memutuskan siapa yang boleh masuk ke Uni Eropa. Rencana ini juga mencakup upaya untuk menghentikan keberangkatan migran ilegal dan mengaktifkan sistem pengembalian yang efektif. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengatakan bahwa gelombang migrasi ini akan mengguncang negara-negara perbatasan terlebih dahulu dan kemudian seluruh Eropa.

Oleh karena itu, masalah ini memerlukan perhatian dan upaya bersama dari semua pihak. Meloni juga menekankan bahwa masalah migrasi tidak bisa diselesaikan hanya dengan memukimkan kembali para migran di dalam Uni Eropa. Masalah ini juga harus ditangani dari akarnya dengan menghentikan keberangkatan ilegal. Secara keseluruhan, migrasi ilegal di Eropa adalah masalah yang sangat kompleks dan melibatkan berbagai faktor sejarah, politik, dan ekonomi. Solusi yang efektif membutuhkan pendekatan yang holistik dan kerja sama internasional untuk mengatasi masalah ini dari akarnya di negara asal para migran. Eropa harus bekerja sama dengan negara-negara asal migran untuk mengatasi faktor-faktor yang mendorong migrasi ilegal, seperti konflik, kemiskinan, dan ketidakstabilan politik, serta memperkuat sistem hukum dan kebijakan migrasi di tingkat nasional dan regional.

Studi Literatur

Dalam tulisan dari Irawan, M. E. M. (2021) tentang Analisa Upaya Pemerintah Italia dalam Menanggulangi Imigran Ilegal Periode 2014-2019 diulas langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Italia untuk menangani imigran ilegal dari tahun 2014

hingga 2019. Beberapa upaya yang disebutkan termasuk peningkatan patroli perbatasan, kolaborasi dengan negara-negara asal dan transit para imigran, serta penegakan hukum yang lebih ketat terhadap para penyelundup manusia. Irawan juga menilai efektivitas dari kebijakan-kebijakan tersebut, menegaskan keberhasilan dan tantangan yang dihadapi, terutama dalam hal menangani imigran yang sudah tiba di Italia dan upaya integrasi mereka ke masyarakat.

Selain itu, dalam tulisan Nasution, A. E. M terkait Analisis Faktor yang Melatarbelakangi Kerjasama Migrasi Italia dan Libya Tahun 2017 ditemukan bahwa faktor-faktor yang mendorong kerjasama antara Italia dan Libya dalam mengatasi migrasi pada tahun 2017 di antaranya: tekanan politik dan ekonomi di kedua negara serta kebutuhan mendesak untuk mengendalikan arus migran dari Afrika Utara melalui Laut Mediterania. Studi ini menjelaskan bahwa Italia berusaha membangun hubungan yang lebih erat dengan Libya untuk memperkuat kontrol perbatasan dan mengurangi jumlah imigran ilegal yang masuk ke Italia. Kerjasama ini melibatkan bantuan teknis dan keuangan dari Italia untuk meningkatkan kapasitas pengawasan di Libya. Namun, Nasution juga mencatat bahwa kerjasama ini menimbulkan ketegangan di Libya dan menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya.

Dalam tulisan Rohma, M. N. (2020) terkait Sekuritisasi Isu Imigran dalam Operasi Sophia Tahun 2015-2018, Rohma membahas bagaimana isu imigran di Eropa disekuritisasi melalui Operasi Sophia yang diluncurkan oleh Uni Eropa pada 2015-2018. Operasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menangkap, dan menghancurkan kapal-kapal penyelundup manusia di Laut Mediterania. Penelitian ini juga menegaskan bahwa Uni Eropa menggunakan pendekatan militer untuk mengatasi krisis imigran, dengan menganggap migrasi ilegal sebagai ancaman keamanan yang harus dihadapi melalui intervensi militer dan kerjasama internasional. Meskipun operasi ini berhasil mengurangi beberapa aktivitas penyelundupan, ada kritik bahwa pendekatan militer ini kurang memperhatikan aspek kemanusiaan dan hak-hak imigran.

Dari penelitian terdahulu ini, tergambar bagaimana Italia dan Uni Eropa berupaya mengatasi krisis imigran ilegal. Dari peningkatan pengawasan perbatasan hingga kerjasama internasional dan operasi militer, berbagai strategi telah diimplementasikan

dengan tingkat keberhasilan yang beragam. Penelitian-penelitian ini juga menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan kerjasama internasional untuk mengatasi akar penyebab migrasi ilegal dan mencapai solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Isu imigrasi telah menjadi salah satu tantangan paling mendesak di Eropa saat ini, dengan Pulau Lampedusa di Italia sering kali menjadi pusat perhatian. Lampedusa, yang terletak di Laut Tengah antara Italia dan Afrika Utara, telah menjadi titik masuk utama bagi banyak migran yang mencoba mencapai Eropa. Krisis migrasi di Lampedusa mencerminkan berbagai masalah kompleks yang melibatkan kemanusiaan, politik, dan kerjasama internasional. Penulis akan membahas isu-isu utama yang berkembang, memberikan contoh kasus terkini, dan menganalisis peran Uni Eropa dalam menangani krisis ini.

Barry Buzan, dalam pemikirannya mengenai keamanan nasional, menekankan bahwa isu ini sangat terkait dengan masalah kelangsungan hidup atau survival. Dalam kerangka Buzan, sekuritisasi dapat dianggap sebagai bentuk ekstrim dari politisasi yang melibatkan persepsi ancaman dengan urgensi dan kedalamannya yang lebih besar daripada sekadar isu politik biasa. Barry Buzan (1997) menyajikan sebuah kerangka kerja yang memperluas pemahaman tentang keamanan, membaginya ke dalam lima dimensi utama: militer, ekonomi, lingkungan, sosial, dan politik.

Dalam konteks ini, kebijakan Italia terkait sekuritisasi menunjukkan bagaimana negara dapat menerapkan pendekatan yang terfokus untuk mengelola ancaman terhadap keamanan nasional. Italia telah mengalami peningkatan tajam dalam jumlah pengungsi dan pencari suaka yang tiba melalui perbatasan lautnya dari negara-negara seperti Albania, Tunisia, dan Libya. Sebagai respons terhadap situasi ini, Italia telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk memperketat kontrol perbatasan dan mengimplementasikan kebijakan yang dirancang untuk memperkuat keamanan nasional dan melindungi identitas budaya.

Langkah-langkah ini mencerminkan pemahaman bahwa pengamanan perbatasan bukan hanya tentang melindungi fisik negara tetapi juga tentang menjaga integritas dan identitas nasional yang lebih luas. Dalam hal ini, sekuritisasi berfungsi sebagai mekanisme untuk mengklasifikasikan isu-isu tertentu, seperti migrasi massal, sebagai ancaman eksistensial yang memerlukan tindakan segera dan intensif. Buzan mengidentifikasi lima dimensi keamanan sebagai alat untuk memahami dan menangani berbagai aspek ancaman terhadap keamanan, dengan setiap dimensi berkontribusi pada pemahaman menyeluruh tentang risiko yang dihadapi. Dalam konteks Italia, kontrol perbatasan yang ketat berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi potensi ancaman yang mungkin timbul dari pergerakan individu yang tidak terdaftar atau yang mungkin membawa risiko keamanan. Pengawasan perbatasan yang ditingkatkan termasuk patroli laut dan penguatan keamanan di pelabuhan serta titik masuk lainnya.

Masalah migrasi juga berdampak pada dimensi ekonomi, di mana Italia menghadapi tantangan dalam menyediakan sumber daya dan infrastruktur untuk menampung dan melayani pengungsi serta pencari suaka. Beban finansial ini tidak hanya mempengaruhi anggaran nasional tetapi juga mempengaruhi stabilitas ekonomi regional. Dalam beberapa kasus, peningkatan jumlah migran dapat menambah tekanan pada lingkungan lokal, seperti dalam hal penggunaan sumber daya dan dampak terhadap kualitas hidup masyarakat setempat. Kebijakan sekuritisasi dapat mencakup langkah-langkah untuk mengelola dampak lingkungan yang dihasilkan oleh arus migrasi yang besar.

Dimensi sosial berhubungan dengan dampak migrasi terhadap masyarakat Italia dan Eropa secara keseluruhan. Pengungsi dan pencari suaka yang tiba di Italia sering kali menghadapi tantangan integrasi sosial dan budaya, yang dapat mempengaruhi kohesi sosial dan identitas kolektif.

Secara politik, Italia harus menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan kewajiban internasionalnya. Sekuritisasi migrasi sering kali memicu debat politik tentang bagaimana menangani arus migran dan bagaimana mendistribusikan tanggung jawab antara negara-negara Uni Eropa.

Menurut Rosie, tantangan utama dari migrasi massal ini bukan hanya ancaman terhadap identitas kolektif Italia dan Eropa, tetapi juga masalah beban keuangan yang signifikan. Pengungsi dan pencari suaka menambah tekanan pada sistem kesejahteraan sosial dan infrastruktur negara, yang pada gilirannya mempengaruhi kapasitas negara untuk memberikan layanan dan perlindungan yang memadai. Dalam rangka menangani tantangan ini, Italia harus mengimplementasikan kebijakan yang tidak hanya memitigasi risiko keamanan tetapi juga menangani dampak sosial dan ekonomi dari migrasi. Ini melibatkan koordinasi dengan negara-negara lain dan lembaga-lembaga internasional untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

Kebijakan Italia dalam hal sekuritisasi adalah contoh konkret bagaimana dimensi-dimensi keamanan yang diidentifikasi oleh Buzan diterapkan dalam praktik. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya memahami keamanan sebagai konsep multidimensi yang melibatkan berbagai aspek dan memerlukan solusi yang komprehensif dan terintegrasi. Adapun isu-isu yang sedang berkembang ialah:

1) Peningkatan Jumlah Migran.

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah migran yang tiba di Lampedusa telah meningkat secara signifikan. Pulau ini sering kali mengalami lonjakan migran yang datang dengan perahu dari Afrika Utara, terutama dari Libya dan Tunisia. Lonjakan ini sering kali melampaui kapasitas tempat penampungan di pulau tersebut. Misalnya, laporan dari berbagai sumber, termasuk CNN dan DW, menunjukkan bahwa Lampedusa sering kali harus menampung jumlah migran yang jauh melebihi kapasitas maksimum fasilitas yang ada. Peningkatan jumlah migran ini tidak hanya menambah beban bagi pihak berwenang lokal tetapi juga menimbulkan tantangan logistik yang signifikan. Fasilitas penampungan sering kali tidak memadai, dan kekurangan sumber daya seperti makanan, air, dan layanan kesehatan memperburuk situasi.

2) Krisis Kemanusiaan.

Situasi kemanusiaan di Lampedusa sering kali sangat memprihatinkan. Migran yang tiba di pulau ini sering kali telah mengalami perjalanan yang sangat berat dan berbahaya, termasuk kondisi yang ekstrem di laut. Setelah tiba di

Lampedusa, mereka sering kali menghadapi kondisi hidup yang sangat buruk, dengan fasilitas penampungan yang sering kali tidak memadai. Hal ini menimbulkan krisis kemanusiaan yang mendalam, di mana migran menghadapi keterbatasan dalam akses ke layanan dasar seperti makanan, air bersih, dan perawatan medis. Berita terbaru dari BBC dan AP News menunjukkan bahwa kondisi di Lampedusa sangat kritis, dengan banyak migran harus tinggal dalam kondisi yang sangat tidak layak. Laporan-laporan ini mencatat kekurangan mendalam dalam layanan dasar dan dukungan kemanusiaan, yang memperburuk penderitaan migran.

3) Ketegangan Politik

Isu migrasi di Lampedusa juga telah menimbulkan ketegangan politik, baik di tingkat nasional Italia maupun di tingkat Uni Eropa. Pemerintah Italia sering kali berada di garis depan dalam menangani krisis ini, tetapi banyak pihak berpendapat bahwa Italia tidak dapat menangani masalah ini sendiri. Ketegangan politik muncul antara pemerintah Italia dan negara-negara Uni Eropa lainnya mengenai bagaimana tanggung jawab harus dibagi dan bagaimana krisis ini harus dikelola. Di tingkat nasional, krisis ini sering kali menjadi topik utama dalam politik Italia, dengan partai-partai politik yang berbeda mengusulkan solusi yang berbeda untuk menangani masalah ini. Ketegangan ini sering kali mencerminkan perbedaan pandangan tentang kebijakan imigrasi dan perlindungan perbatasan.

Salah satu contoh terkini dari krisis migrasi di Lampedusa adalah peristiwa yang terjadi pada September 2023. Laporan dari CNN, DW, dan Reuters menunjukkan bahwa pada bulan tersebut, Lampedusa menghadapi lonjakan besar dalam jumlah migran yang tiba. Hal ini menyebabkan krisis kemanusiaan yang mendalam dan menimbulkan perhatian internasional. Laporan-laporan berita mencatat bahwa jumlah migran yang tiba di Lampedusa mencapai angka yang sangat tinggi, menyebabkan fasilitas penampungan menjadi penuh dan kondisi hidup menjadi sangat buruk. Banyak migran harus tinggal di tempat-tempat penampungan sementara yang tidak memadai, dengan akses yang terbatas ke layanan dasar. Situasi ini menarik perhatian internasional dan memicu respons dari berbagai lembaga dan pemerintah, termasuk Uni Eropa. Krisis ini menegaskan kesulitan yang dihadapi

Lampedusa dan Italia dalam menangani arus migran yang tinggi, serta tantangan yang terkait dengan penyediaan dukungan kemanusiaan yang memadai.

Respons Uni Eropa terhadap krisis migrasi di Lampedusa mencakup berbagai langkah strategis yang dirancang untuk membantu Italia dan negara-negara anggota lainnya dalam menangani masalah ini. Salah satu langkah utama yang diambil oleh Uni Eropa adalah peluncuran rencana aksi 10 poin pada September 2023. Uni Eropa mengumumkan rencana aksi 10 poin untuk membantu Italia dalam mengatasi krisis migrasi di Lampedusa. Rencana ini mencakup berbagai langkah strategis yang dirancang untuk menangani tantangan yang dihadapi oleh Italia dan negara-negara anggota lainnya. Beberapa poin kunci dari rencana aksi ini meliputi, penguatan pengawasan perbatasan, Uni Eropa berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan perbatasan di daerah-daerah yang paling terdampak, termasuk Lampedusa.

Selain itu, peningkatan kapasitas untuk memantau dan mengelola arus migran, serta peningkatan koordinasi antara negara-negara anggota. Peningkatan Kapasitas Tempat Penampungan Rencana aksi ini mencakup dukungan untuk meningkatkan kapasitas tempat penampungan di Italia dan negara-negara anggota lainnya. Selanjutnya, pembangunan fasilitas penampungan tambahan dan peningkatan kondisi di tempat-tempat penampungan yang sudah ada. Dukungan Kemanusiaan, Uni Eropa akan memberikan bantuan tambahan untuk mendukung layanan dasar bagi migran, termasuk makanan, air bersih, dan perawatan medis. Dukungan ini bertujuan untuk mengurangi penderitaan migran dan memastikan bahwa mereka mendapatkan bantuan yang diperlukan.

Melalui kerjasama di tingkat internasional, rencana aksi ini juga mencakup upaya untuk meningkatkan kerjasama dengan negara-negara asal migran dan negara-negara transit. Kerjasama dengan negara-negara Afrika Utara seperti Tunisia dan Libya untuk mengelola arus migrasi dan menangani penyebab migrasi yang mendasar. Melalui mekanisme diplomasi dan kerjasama internasional, Uni Eropa juga terlibat untuk mengatasi akar penyebab migrasi dan mengelola arus migran. Selain itu adanya kerjasama dengan negara asal sebagai upaya untuk mengurangi arus migran dan

meningkatkan pengelolaan perbatasan. Ini termasuk dukungan teknis dan finansial untuk negara-negara tersebut, serta upaya untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap aktivitas penyelundupan manusia.

Uni Eropa juga menyediakan bantuan finansial dan dukungan teknis untuk negara-negara anggota dalam menangani krisis migrasi. Ini mencakup dukungan untuk infrastruktur penanganan migrasi, peningkatan kapasitas tempat penampungan, dan penyediaan layanan dasar bagi migran. Krisis migrasi di Lampedusa merupakan contoh kompleks dari tantangan migrasi yang dihadapi oleh Eropa saat ini. Peningkatan jumlah migran, kondisi kemanusiaan yang buruk, dan ketegangan politik menjadi isu utama yang harus diatasi. Respons Uni Eropa melalui rencana aksi 10 poin, diplomasi internasional, dan dukungan finansial serta teknis merupakan langkah-langkah penting dalam menangani krisis ini.

Namun, penanganan krisis migrasi memerlukan kolaborasi yang kuat antara negara-negara anggota Uni Eropa dan lembaga-lembaga internasional. Tantangan yang dihadapi Lampedusa mencerminkan kebutuhan untuk pendekatan yang lebih terkoordinasi dan berkelanjutan dalam mengelola migrasi dan memberikan dukungan kemanusiaan. Krisis ini juga menegaskan pentingnya mengatasi penyebab mendasar dari migrasi, termasuk kondisi politik dan ekonomi di negara-negara asal migran. Uni Eropa dan negara-negara anggota harus terus bekerja sama untuk mengembangkan solusi yang komprehensif dan efektif dalam menghadapi tantangan migrasi global. Kondisi sosial-ekonomi di Tunisia juga berperan penting dalam krisis ini. Negara tersebut sedang mengalami inflasi tinggi dan kekurangan lapangan kerja yang serius, yang telah memperburuk kehidupan penduduknya.

Rasa permusuhan dan kekerasan terhadap migran dari sub-Sahara semakin meningkat, dipicu oleh komentar kontroversial dari presiden Tunisia yang mengkritik migran Afrika. Situasi ini telah memaksa banyak orang yang telah lama tinggal dan bekerja di Tunisia untuk mencari perlindungan di Eropa, meningkatkan tekanan pada negara-negara Eropa yang menghadapi krisis migrasi. Namun, motivasi untuk migrasi tidak dapat dijelaskan sepenuhnya hanya dengan faktor-faktor ekonomi dan sosial. Banyak migran yang tiba di Lampedusa melakukannya untuk menghindari penganiayaan

atau karena kondisi hidup yang tidak dapat ditoleransi di negara asal mereka. Beberapa migran melarikan diri dari konflik bersenjata atau rezim yang menindas, sementara yang lain terpaksa meninggalkan tanah kelahiran mereka karena perubahan iklim yang ekstrem, ketidakstabilan politik, dan kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar. Istilah "migran bertahan hidup" merujuk pada mereka yang, meskipun tidak memenuhi definisi resmi pengungsi menurut Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, terpaksa bermigrasi karena situasi hidup yang sangat memprihatinkan.

Dalam memahami krisis migrasi di Eropa dan respons Italia, teori serta materi yang telah dipelajari di kelas dapat memberikan pengetahuan yang mendalam tentang dinamika geopolitik dan kebijakan keamanan. Beberapa sumber literatur yang relevan, seperti Dinan (2014), Kalembang, serta Purmintasari, dapat digunakan untuk menganalisis konteks dan implikasi dari kebijakan sekuritisasi Italia dalam kerangka teori hubungan internasional dan keamanan.

Dinan (2014) dalam bukunya *Europe Recast: A History of European Union* menguraikan sejarah dan evolusi Uni Eropa sebagai entitas politik dan ekonomi. Dinan menjelaskan bagaimana Uni Eropa telah berkembang dari komunitas ekonomi menjadi sebuah persatuan politik yang lebih kompleks dengan berbagai institusi dan kebijakan bersama. Krisis migrasi di Lampedusa dan kebijakan sekuritisasi Italia dapat dipahami dalam konteks integrasi Eropa ini.

Uni Eropa memiliki mandat untuk mengelola kebijakan migrasi dan perbatasan yang berfungsi untuk memastikan keamanan dan stabilitas di seluruh wilayah. Italia, sebagai anggota Uni Eropa, berada dalam posisi yang dilematis antara memenuhi kewajiban internasional dan melindungi kepentingan nasionalnya. Integrasi Eropa menawarkan kerangka kerja untuk analisis tentang bagaimana negara-negara anggota berkoordinasi dalam menghadapi tantangan migrasi, namun juga menggarisbawahi ketegangan antara kebijakan nasional dan solidaritas Eropa.

Jika dikaitkan dengan Perspektif Hegemoni dan Pengaruh Internasional, Kalembang dalam artikel mereka tentang Pakta Warsawa menjelaskan tentang hegemoni Uni Soviet dan dampaknya terhadap negara-negara Eropa Timur selama Perang Dingin. Meskipun konteksnya berbeda, konsep hegemoni dapat diadaptasi untuk menganalisis

bagaimana kekuatan besar, seperti Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, mempengaruhi kebijakan migrasi dan sekuritisasi. Italia sebagai negara transit utama berfungsi dalam konteks hegemonik Uni Eropa, di mana kebijakan migrasi dan sekuritisasi tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan nasional Italia tetapi juga oleh tekanan dari kebijakan Uni Eropa secara keseluruhan.

Hegemoni Uni Eropa dalam hal ini dapat terlihat dalam upaya Uni Eropa untuk menetapkan standar dan kebijakan yang diharapkan diterima oleh semua negara anggotanya. Italia harus menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan kepatuhan terhadap kebijakan Eropa yang lebih luas, serupa dengan bagaimana negara-negara dalam Pakta Warsawa harus menavigasi antara kepentingan nasional mereka dan dominasi Uni Soviet.

Adapun Kajian tentang Kebijakan Kontainment dan Keamanan Militer, Purmuntasari (2014) dalam artikel NATO: Kajian Implementasi Containment Policy Bidang Militer di Eropa (1949-1991) membahas tentang kebijakan containment yang diterapkan oleh NATO selama periode Perang Dingin untuk menahan ekspansi Soviet di Eropa. Meskipun kebijakan containment berfokus pada aspek militer, prinsip-prinsipnya dapat diterapkan dalam konteks sekuritisasi migrasi.

Sekuritisasi migrasi yang diterapkan oleh Italia mencerminkan bentuk dari kebijakan *containment* yang modern, di mana Italia berusaha untuk menahan dan mengelola ancaman yang dipersepsikan dari luar melalui penguatan pengawasan perbatasan dan kebijakan ketat terhadap migrasi. Sama seperti NATO yang menggunakan strategi *containment* untuk melindungi wilayahnya dari pengaruh Soviet, Italia menggunakan sekuritisasi untuk melindungi identitas nasional dan Eropa dari ancaman yang terkait dengan arus migrasi masal.

Dengan menggabungkan pandangan Dinan tentang integrasi Eropa, Kalembang dan Kalembang tentang hegemoni, dan Purmuntasari tentang kebijakan *containment*, studi ini melihat bahwa kebijakan sekuritisasi Italia tidak hanya merupakan respons terhadap ancaman langsung tetapi juga bagian dari strategi yang lebih besar dalam konteks integrasi Eropa dan pengaruh politik. Kebijakan ini mencerminkan ketegangan antara kepentingan nasional dan komitmen terhadap kebijakan bersama Uni Eropa, serta

bagaimana prinsip-prinsip keamanan yang lebih luas diterapkan dalam konteks migrasi global. Krisis migrasi dan sekuritisasi di Italia menunjukkan bagaimana teori hubungan internasional dan keamanan dapat diadaptasi untuk memahami dinamika yang kompleks dalam kebijakan migrasi, serta bagaimana interaksi antara kepentingan nasional dan kewajiban internasional membentuk kebijakan keamanan di era globalisasi.

Kesimpulan

Dalam menganalisis krisis migrasi di Lampedusa melalui lensa teori Barry Buzan tentang sekuritisasi, kita dapat memahami bagaimana masalah ini tidak hanya berkaitan dengan keamanan fisik, tetapi juga melibatkan dimensi yang lebih luas dari keamanan nasional. Buzan membagi keamanan menjadi lima dimensi utama: militer, ekonomi, lingkungan, sosial, dan politik. Pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang berguna untuk mengevaluasi bagaimana negara, seperti Italia, mengelola ancaman yang terkait dengan migrasi masal.

Kebijakan Italia terkait sekuritisasi menunjukkan bagaimana sebuah negara dapat menggunakan pendekatan terfokus untuk menangani ancaman terhadap keamanan nasional. Italia telah mengalami peningkatan tajam dalam jumlah pengungsi dan pencari suaka yang tiba melalui perbatasan lautnya dari negara-negara seperti Albania, Tunisia, dan Libya. Respons Italia terhadap situasi ini mencakup penguatan kontrol perbatasan dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi keamanan nasional dan identitas budaya.

Ini mencerminkan pemahaman bahwa pengamanan perbatasan tidak hanya tentang melindungi wilayah negara, tetapi juga tentang menjaga integritas dan identitas nasional yang lebih luas. Peningkatan jumlah migran yang tiba di Lampedusa, krisis kemanusiaan yang mendalam, dan ketegangan politik merupakan isu utama yang harus ditangani. Lonjakan jumlah migran sering kali melampaui kapasitas fasilitas penampungan, menciptakan kondisi hidup yang sangat buruk bagi para migran.

Ketegangan politik di tingkat nasional dan Uni Eropa mencerminkan perbedaan pandangan tentang bagaimana menangani arus migran dan membagi tanggung jawab. Respons Uni Eropa, termasuk rencana aksi 10 poin, diplomasi internasional, dan

dukungan finansial serta teknis, merupakan langkah-langkah penting dalam mengatasi krisis ini. Rencana aksi ini mencakup penguatan pengawasan perbatasan, peningkatan kapasitas tempat penampungan, dan dukungan kemanusiaan tambahan.

Selain itu, Uni Eropa berupaya meningkatkan kerjasama dengan negara-negara asal migran dan negara-negara transit untuk mengelola arus migrasi dan menangani penyebab mendasar dari migrasi. Krisis migrasi di Lampedusa dapat diketahui pentingnya pendekatan yang terkoordinasi dan berkelanjutan dalam mengelola migrasi dan memberikan dukungan kemanusiaan. Solusi yang efektif memerlukan kolaborasi antara negara-negara anggota Uni Eropa, lembaga-lembaga internasional, dan negara-negara asal migran. Mengatasi penyebab mendasar dari migrasi, termasuk kondisi ekonomi, politik, dan lingkungan di negara-negara asal, adalah kunci untuk menciptakan solusi jangka panjang yang berkelanjutan. Dalam hal ini, pemahaman tentang keamanan sebagai konsep multidimensi, seperti yang diuraikan oleh Buzan, sangat penting untuk menangani tantangan migrasi yang semakin kompleks ini.

Daftar Pustaka

- Brennan, E. (2023). *EU chief pledges action while visiting Italian island hit by soaring migrant arrivals*. CNN. Accessed from <https://edition.cnn.com/2023/09/17/europe/ursula-von-der-leyen-lampedusa-migrant-crisis-intl/index.html>
- Dinan, Desmond. (2014). "Europe Recast: A History of European Union". Boulder, CO: Lynne Reinner
- Irawan, M. E. M. (2021). Analisa Upaya Pemerintah Italia dalam Menanggulangi Imigran Ilegal Periode 2014-2019 (Bachelor's thesis, Fisip UIN Jakarta).
- Kalembang, Elpius dan Kalembang, Joseph Victor. "Pakta Warsawa: Latar Belakang, Sejarah, dan Hegemoni Uni Soviet". Jurnal Poros Politik
- Muguruza, C. C. (2023). *What's happening on Lampedusa – and what Europe needs to do now to manage migration*. The Conversation, Accessed from

<https://theconversation.com/whats-happening-on-lampedusa-and-what-europe-needs-to-do-now-to-manage-migration-214650>

Nardi, Y. (2023). *EU chief pledges migrant action plan in Italy's Lampedusa*. Reuters, Accessed from <https://www.reuters.com/world/europe/eu-chief-pledges-migrant-action-plan-italys-lampedusa-2023-09-17/>

Nasution, A. E. M. Analisis Faktor yang Melatarbelakangi Kerjasama Migrasi Italia dan Libya Tahun 2017 (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Purmintasari, Yulita Dewi. "NATO: Kajian Implementasi Containment Policy Bidang Militer di Eropa (1949-1991). Socia Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial. 10:2, pp. 147-156

Rohma, M. N. (2020). Sekuritisasi Isu Imigran dalam Operasi Sophia Tahun 2015-2018.

Seckin, B. and Cam, O. T. (2023). *EU Commission chief unveils 10-point plan to help Italy amid Lampedusa migrant crisis*. Anadolu Agency, Accessed from <https://www.aa.com.tr/en/europe/eu-commission-chief-unveils-10-point-plan-to-help-italy-amid-lampedusa-migrant-crisis/2994125>

Shankar, P. (2023). *Migrants on Lampedusa: Italy, EU announce action plan*. Deutsche Welle, Accessed from <https://www.dw.com/en/migrants-on-lampedusa-italy-eu-announce-action-plan/a-66838091>

Toman, S. (2023). *Lampedusa: Ursula von der Leyen and Giorgia Meloni visit island after migrant boat fears*. BBC, Accessed from <https://www.bbc.com/news/world-europe-66836614>